

## **BAB IV**

### **LANGKAH PEACE KEEPING DAN PEACE BUILDING DI MESIR**

Dalam bab IV akan diuraikan hubungan peran PBB *dalam Peace keeping operation* dan *peace building* dari konflik di Mesir dalam menangani *human security* pasca revolusi Mesir.

*Human security* merupakan suatu paradigma yang dipakai dalam memahami permasalahan global yang menyangkut keamanan manusia secara individu dalam sebuah populasi dunia yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas baik nasional, regional, maupun global. UNDP menjelaskan konsep *human security* adalah mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Dewan keamanan PBB yang merupakan sebuah lembaga penegak perdamaian dunia memberi perhatian penuh dalam hal *human security* yang merupakan bagian utama dalam penegakan perdamaian. Seperti halnya yang dilakukan PBB terhadap konflik yang ada di Mesir. Pada masa pemerintahan Mursi, ia mengeluarkan dekrit dengan upaya untuk menghalangi langkahnya baik secara hukum melalui pengadilan maupun secara politik melalui parlemen. Hal tersebut yang menuai demonstrasi antar rakyat dengan tentara, akibatnya banyak korban kekerasan dan dampak lainnya yaitu keamanan

komunitas, keamanan politik, serta keamanan ekonomi Mesir terjadi penurunan. Hal tersebut merupakan ancaman besar bagi *human security* di Mesir. Kekerasan makin marak terjadi yang sebagian besar dilakukan oleh pihak – pihak yang oposan terhadap keputusan Mursi. Demonstrasi terjadi di negeri Pyramid, pembunuhan, pembakaran dan perusakan aset – aset milik pemerintah dilakukan oleh masyarakat Mesir.

**A. Operasi Penjaga Perdamaian (*Peacekeeping Operations*)**

Tujuan PBB seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 piagam PBB adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Terkait dengan penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka PBB, maka dalam hal ini pada permasalahan human security di Mesir pasca revolusi, organisasi internasional PBB akan melakukan sebuah proses *peacekeeping*.

Dalam *Peacekeeping Operations* (operasi penjaga perdamaian) secara sah dilakukan oleh dewan keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga dari pihak-pihak lain yang dapat terlibat didalamnya. Pihak tersebut termasuk militer dan personil kepolisian serta staf dari pihak sipil. Operasi itu dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau kombinasi dari keduanya.

Operasi yang dilakukan PBB dapat berupa misi pengamatan militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau perpaduan dari keduanya. Seperti dalam

misi pengamatan militer dilakukan oleh petugas tidak bersenjata, yang biasanya untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap sebuah kesepakatan atau gencatan senjata.

PBB dalam membantu penyelesaian konflik sebagai penjaga perdamaian, dimana PBB dalam hal ini membantu dengan melakukan operasi penjaga perdamaian yang mempunyai misi - misi perdamaian. Operasi PBB yang bersifat universal menawarkan sebuah keuntungan sebagai tujuan dari konflik yang terjadi. Sifat universal tersebut diberikan kepada legitimasi dan batasan dari implikasi kedaulatan negara penyelenggara atau pihak-pihak yang bertikai.

Dalam kasus yang ada di Mesir ini PBB melakukan penjagaan keamanan di daerah konflik dengan mengirimkan anggota keamanan militer dan polisi yang berkerjasama dengan Amerika. Anggota keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 500.000 personil untuk berjaga dan meredakan konflik yang terjadi.<sup>1</sup> Dalam bentrokan dengan Militan Ikhwanul Muslimin tewaskan 12 polisi, dalam insiden penggrebakan markas militan Ikhwanul Muslimin di Kota Kerdasah.<sup>2</sup> Selain itu Dewan Keamanan PBB mendesak semua pihak di Mesir untuk menahan diri setelah sidang darurat yang

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> "Bentrokan dengan Militan Ikhwanul." Diakses melalui <http://www.pikiran-rakyat.com/node/251477>, diakses tanggal 19 September 2013

dilakukan setelah 638 orang tewas ketika pasukan keamanan membubarkan aksi demonstran pendukung Ikhwanul Muslimin.<sup>3</sup>

Dalam hal ini *peace keeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *peacefull settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, serta membuat rencana operasional dan metodologi terhadap operasi yang bersifat multi dimensi seperti, pengawasan pemilihan umum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas dan persiapan pengawasan perdamaian. Upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian dapat dilakukan dengan berbagai hal dan secara konstan dilakukan perlahan mengikuti keadaan yang ada. Beberapa hal yang dilakukan PBB dalam melakukan operasi penjaga perdamaian (*peace keeping*) selama bertahun-tahun, seperti:<sup>4</sup>

1. Mengelola sebuah genjatan senjata atau pemidahan kekuatan. Dengan menyediakan sebuah “area bernafas”, dimana operasi didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi.
2. Melakukan *presentive deployment*, sebuah operasi dimana PBB menyediakan jaminan dan tingkatan sebuah transparansi dengan dukungan untuk kemajuan secara politik.

---

<sup>3</sup> “PBB meminta semua pihak di Mesir menahan diri.” Diakses melalui [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130816\\_pbb\\_mesir](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130816_pbb_mesir), diakses tanggal 16 Agustus 2013

<sup>4</sup> *Basic Fact Of United Nations*, hal. 73.

3. Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target sebagai tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Situasi seperti ini, penjaga perdamaian telah dimintai untuk melakukan perlindungan dan mendukung dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Tetapi secara politik dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri.

Dalam pencapaian perdamaian atas konflik, PBB melakukan operasi penjaga perdamaian dengan melakukan misi pengamatan militer dan misi perlindungan terhadap para pengungsi dengan mendirikan wilayah-wilayah di zona aman dari konflik serta melakukan transformasi – transformasi nilai untuk peningkatan kapasitas institusi dan nilai sosial. PBB juga meminta anggotanya untuk ikut membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara mengkoordinasikan bantuan dari negara – negara anggota untuk ikut serta dalam membantu misi perdamaian.

**Table 4.1 Jumlah korban tewas akibat demonstrasi Mesir**

<b>No</b>	<b>Korban yang tewas</b>	<b>Jumlah</b>
1	Warga sipil	2.927
2	Wartawan	11
3	Anak dibawah umur	164

4	Perempuan	72
5	Tentara	95
6	Polisi	226
7	Pelajar	299

Sumber database statistik Mesir

Data diatas diambil dari database statistic Mesir untuk revolusi yang dirilis oleh media masa di Mesir. Dengan begitu, konflik demonstrasi yang terjadi di Mesir mengundang perhatian sekjen PBB Ban Ki Moon untuk menanggapi masalah demonstrasi yang dilakukan rakyat Mesir dan tentara Mesir.

Aksi penyerbuan berdarah pasukan keamanan Mesir terhadap demonstiran pendukung presiden Mursi, mendapat kencaman tegas dari komunitas internasional. PBB, Amerika Serikat, Inggris Iran Qatar, dan Turki secara tegas mengutus aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna membubarkan demonstiran di dua kamp protes di Kairo.<sup>5</sup> Aksi tersebut mengundang perhatian sekertaris jendral PBB Ban Ki Moon, yang mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri menyampaikan penyesalan yang mendalam atas langkah kekerasan yang ditempuh pemerintah Mesir untuk

---

<sup>5</sup> “Dunia Kecam Pertumpahan Darah di Mesir,” diakses melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/390597/dunia-kecam-pertumpahan-darah-dunia-di-mesir>, diakses, kamis 15 Aguatus 2013.

menghadapi demonstrasi yang tengah berlangsung di negara itu, pernyataan itu dirilis oleh juru bicaranya.<sup>6</sup>

Sekretaris jendral PBB Ban Ki Boom dalam pidatonya yang menanggapi permasalahan aksi demonstrasi di Mesir menyatakan bahwa untuk tidak melakukan kekerasan dan menjamin kebebasan berekspresi dan informasi, pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat Mesir karena rakyat Mesir mengalami penekanan dan depresi pasca terjadinya bentrokan tersebut, sekjen Ban Ki Boom juga mengatakan untuk melakukan transisi dengan tertib tidak dengan kekerasan.<sup>7</sup>

Dalam operasi perdamaian ada beberapa negara yang terlibat dalam operasi perdamaian. Salah satunya Indonesia, Indonesia meminta PBB untuk bertindak cepat, untuk mengirimkan pasukan Garuda untuk perdamaian serta melakukan langkah diplomatic demi tegaknya demokrasi di Mesir. Tidak hanya itu, Indonesia mendorong komnas HAM PBB untuk mengadili tokoh oposisi ke mahkamah Internasional. Amerika Serikat memberikan bantuan dengan mengirim anggota militer untuk membantu mengakhiri pembantaian yang terjadi di Mesir. Negara – negara lain seperti Amerika Serikat menyatakan lewat juru bicara gedung Putih Josh Earnets, yang sebelumnya

---

<sup>6</sup> “Dunia Kecam Pertumpahan Darah di Mesir,” diakses melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/390597/dunia-kecam-pertumpahan-darah-dunia-di-mesir>, diakses, Kamis 15 Agustus 2013.

<sup>7</sup> <http://www.antarane.ws.com/berita/245387/sekjen-pbb--rakyat-mesir-inginkan-pembaruan-yang-berani>

mendukung pemerintah Mesir dengan menyetujui keras aksi kekerasan yang dilakukan terhadap pemrotes dan mendesak pihak militer untuk lebih menahan diri. Turki yang juga dekat dengan pemerintah Mursi mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah cepat atas apa yang mereka sebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

*“Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab, harus bertindak cepat guna menghentikan pembantaian itu,”* pernyataan dari kantor Perdana Menteri Turki.

Setelah PBB melakukan berbagai upaya untuk membantu aksi konflik demonstrasi di Mesir, PBB juga mulai melakukan program *peacebuilding operations* untuk membantu jalannya pemerintahan serta mengembalikan Mesir pada situasi yang damai, jauh dari ancaman terhadap *human security* yang sangat diimpikan oleh masyarakat Mesir.

## **B. Operasi Pembangunan (*Peacebuilding Operations*)**

Human security dalam kebijakan dan implementasinya terkait erat dengan konsep *peace building*. Laporan PBB yang berjudul *An Agenda for Peace*, menggariskan bahwa konsep *peace building* disini merupakan proses yang lebih dekat dengan kondisi pasca konflik dimana yang bertujuan



mengidentifikasi dan mendukung struktur – struktur yang akan dapat memperkuat dan mengokohkan perdamaian guna mencegah konflik muncul kembali dengan mengidentifikasi akar – akar penyebab konflik. Tujuan dari post conflict peace building tersebut tidak lain adalah menciptakan faktor – faktor untuk membentuk institusionalisasi perdamaian. Walaupun masih banyak perdebatan tentang faktor – faktor tersebut, namun garis besar faktor – faktor tersebut diarahkan pada kebutuhan dasar manusia, yang jika merasa mendapatkan ancaman akan menimbulkan konflik. Stabilitas sosial, keamanan internal, peluang ekonomi, standard hidup yang layak, dan pengakuan akan identitas dan eksistensi merupakan kebutuhan – kebutuhan dasar manusia. Semua itu harus dilakukan dalam kerangka pemahaman akan pentingnya asistensi membangun kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peacebuilding memiliki dua tujuan utama, yakni: *pertama*, mencegah terjadinya kembali konflik terbuka berdimensi kekerasan, dan *kedua*, membantu proses pemulihan dan mempercepat penyelesaian akar konflik atau membangun perdamaian yang *self sustaining*.<sup>8</sup>

*Peacebuilding operations* pada dasarnya cenderung mengakomodasi strategi penanganan konflik melalui transformasi konflik. *Peacebuilding* mencakup berbagai aktivitas yang sangat kompleks yang mengindikasikan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

bukan hanya pemahaman tentang konflik sebagai fenomena yang sangat kompleks tetapi pendekatan yang komprehensif. *Peacebuilding* lebih berangkat dari wacana perdamaian daripada konflik, disamping itu, perdamaian dalam konteks *peacebuilding* lebih bermakna positif, yaitu berakhirnya semua bentuk kekerasan (fisik, structural, dan kultural) serta terciptanya kondisi – kondisi yang memungkinkan individu untuk berkembang.

Misi PBB dalam laporannya yang berjudul *An Agenda for Peace* yaitu, berupa pemberian sanksi, embargo maupun pembekuan aset – aset milik negara yang dinilai telah melakukan sebuah tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Agenda untuk perdamaian ini berisi lima konsep, yaitu *preventive diplomacy, peace enforcement, peace making, peace keeping, postconflict peacebuilding*.<sup>9</sup>

Report UNDP tahun 1994 menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan erat antara keberhasilan menciptakan keamanan dengan kesuksesan di bidang pembangunan, demokratisasi serta penjaminan hak asasi manusia semakin memperkuat *peacebuilding* dalam PBB serta pemikiran penciptaan perdamaian.<sup>10</sup> PBB berkomitmen untuk mengembangkan gagasan *peacebuilding* serta mengevaluasi operasi perdamaian yang dilakukan PBB

---

<sup>9</sup> United state, *Turbulent Peace The Challenges of Managing International Conflict*, Washington, DC, United State Institute of Peace Press, 2001 hal.530

<sup>10</sup> *United Nation Development Programme, Human Security*

merekomendasikan adanya perubahan terhadap strategi pelaksanaan *peacebuilding* pada fase setelah konflik.

Operasi membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislative, dan yudikatif, juga mencakup militer dan kepolisian. Institusi militer dan kepolisian memegang peranan penting dalam mengendalikan masyarakat pasca konflik yang rentan terhadap provokasi dan sangat mendambakan penegak hukum dan keadilan. Diluar institusi formal, ditingkat masyarakat sipil juga perlu untuk dibangun. Misalnya dengan membentuk komisi kebenaran, jaringan ormas, lembaga swadaya masyarakat (terutama yang pernah bertikai) dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu sekaligus sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat, berpartisipasi dan bekerjasama. Dengan harapan rasa ketidakpercayaan atas pemerintah lambat laun dapat berkurang oleh model sosial. Operasi perdamaian lainnya yaitu dengan cara personal. Dimana para korban diberikan penyembuhan terhadap trauma atau trauma *healing*. Korban konflik mesti keluar dari jeratan dendam, ketakutan, dan dapat saling memaafkan.<sup>11</sup>

Konflik yang dialami warga Mesir pasca revolusi dan demonstrasi banyak mengakibatkan beberapa faktor tidak terkecuali banyak mengakibatkan kerugian dibidang konstruksi, investasi asing, sektor

---

<sup>11</sup> Amalia Falah Alam “*Strengthening Sustainable Peace and Development*”. Bappenas – UNDP senin, 14 April 2008.

pariwisata yang terhenti karena adanya aksi demonstran, dan pemasukan negara yang berkurang akibat produksi terhenti.

Perekonomi Mesir pasca terjadinya demonstrasi sangat terpuruk. Arus masuk investasi asing ke Mesir mencapai titik nol. Devisa dari sektor pariwisata anjlok hingga 80% dan Mesir merugi USD 40 juta setiap harinya akibat terhentinya aktifitas pariwisata. Tingkat kemiskinan Mesir naik tajam hingga 70% dimana 48% warga Mesir hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan jumlah tersebut semakin meningkat. Utang luar negeri dan domestic mencapai USD 180 miliar atau 90% dari pendapatan domestic nasional Mesir. Pemasukan negara menurun akibat produksi terhenti, baik akibat revolusi maupun unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah. Pada Mei 2011, sektor industry Mesir merugi mencapai USD 3,2 miliar. Pertumbuhan ekonomi anjlok hanya 2,5% pada tahun 2011 dan hanya naik hingga 4% pada tahun 2012.<sup>12</sup>

Kerugian lainnya akibat aksi demonstrasi pasca revolusi Mesir dilakukan oleh warga Mesir yang mogok kerja dan menuntut bayaran serta tunjangan yang lebih baik mengakibatkan Mesir mengalami kerugian sebesar 9 miliar Pond.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> “Mursi vs Shafik, Citra IM Kontra NDP.” diakses melalui <http://m.kompas.com/news/read/2012/05/27/03333571/mursi.vs.shafik..citra.im.kontra.ndp> pada tanggal 29 Mei 2012

<sup>13</sup> “Mesir Hadapi Permasalahan Ekonomi Pasca Mubarak”. Diakses melalui <http://www.voaindonesia.com>, diakses tanggal Rabu, 19 Agustus 2015

Dari data perekonomian diatas, presiden Mesir pasca revolusi melakukan pertemuan ke Jerman untuk meminta bantuan agar Berlin bersedia menghapus hutang Mesir sebesar US\$300 juta. Bantuan Jerman amat diperlukan untuk proses pemulihan di tengah masalah sosial politik dan ekonomi yang memburuk.<sup>14</sup>

Bantuan untuk memulihkan perekonomian dan kerusakan yang terjadi di Mesir tidak hanya dari Jerman. Kerajaan Arab Saudi memberikan bantuan US\$2 miliar akan dideposito langsung ke Bank Sentral Mesir, dan separuh sisanya akan didistributorkan lewat sejumlah bantuan pembangunan lewat Dana Pembangunan Saudi. Bantuan itu diberikan dalam Konferensi Pembangunan Ekonomi Mesir yang berlangsung di kawasan tepi laut merah, pertemuan tersebut dihadiri 100 negara Afrika, Amerika Latin, Asia, Eropa, dan AS. Sebanyak 25 negara Arab dan organisasi internasional ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut.<sup>15</sup>

Upaya lain yang dilakukan PBB terhadap konflik Mesir dalam *peacebuilding operations*, PBB melakukan misi perlindungan untuk para korban demonstrasi dengan membangun pengungsian diwilayah – wilayah

---

<sup>14</sup> “Mesir meminta bantuan ekonomi ke Jerman.” Diakses melalui [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130130\\_morsi\\_jerman](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/01/130130_morsi_jerman) tanggal 30 Januari 2013

<sup>15</sup> “Mesir raih dana bantuan pembangunan miliaran dolar.” Diakses melalui <http://dunia.inilah.com/read/detail/2186895/mesir-raih-dana-bantuan-pembangunan-miliaran-dolar> sabtu 14 Maret 2015

yang jauh dari daerah konflik. PBB juga melakukan bantuan kemanusiaan dalam peperangan di Mesir dengan memfasilitasi korban demonstran.<sup>16</sup>

Hal tersebut yang diuraikan diatas merupakan upaya yang dilakukan PBB dalam membantu menangani konflik yang terjadi di Mesir. Mulai dari peacekeeping operations yaitu perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik, mengelola sebuah senjata, dan pemberian sanksi dan dukungan oleh negara – negara lain dan organisasi PBB. Serta peacebuilding operations dimana PBB juga membantu dalam hal pembentukan satuan keamanan, membangun wilayah – wilayah untuk para pengungsi, PBB juga membantu dalam menjembatani bantuan dari pihak negara lain, seperti peminjaman dana untuk pembangunan Mesir, sampai pemberian bantuan militer.

---

<sup>16</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/16/mrmgxu-demonstran-antikekerasan-mesir-diterima-di-kantor-pbb>. Diakses 16 Agustus 2013